

**TATA KELOLA PEMERINTAH DAERAH MELALUI E-GOVERNMENT
DALAM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN MAKAN BERGIZI GRATIS
(MBG) DI KABUPATEN TULANG BAWANG**

(Skripsi)

Oleh

**SYIFA RUBY ZAKIA
NPM 2416041081**



**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
2025**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	2
I. PENDAHULUAN	4
1.1 Latar Belakang	4
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Manfaat Penelitian	8
1.5 Sistematika Penulisan	9
II. TINJAUAN PUSTAKA.....	10
2.1 Penelitian Terdahulu	11
2.2 Tinjauan tentang Kebijakan Publik.....	13
2.2.1 Definisi Kebijakan Publik menurut Para Ahli	13
2.2.2 Karakteristik dan Kategori Kebijakan Publik	15
2.2.3 Tahapan Siklus Kebijakan dan Implikasinya bagi Implementasi	17
2.2.4 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan (Dunn dan Grindle)	17
2.3 Tinjauan tentang Program Makan Bergizi Gratis (MBG)	19
2.3.1 Pengertian Program Makan Bergizi Gratis (MBG)	20
2.3.2 Latar Belakang dan Landasan Hukum Pelaksanaan Program MBG ...	20
2.3.3 Tujuan dan Sasaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG).....	21
2.3.4 Mekanisme Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG)	23
2.3.5 Permasalahan dan Tantangan Implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG)	24
2.3.6 Relevansi Program MBG terhadap Tata Kelola Pemerintahan Daerah	27
2.4 Tinjauan tentang E-Government dan Good Governance	28
2.4.1 Pengertian E-Government.....	28
2.4.2 Tujuan dan Manfaat E-Government	29
2.4.3 Prinsip dan Komponen E-Government	29
2.4.4 Tantangan dalam Implementasi E-Government	30

2.4.5 Hubungan E-Government dengan Good Governance	31
2.4.6 Penerapan E-Government dalam Konteks Kebijakan Makan Bergizi Gratis (MBG)	32
2.5 Landasan Teori.....	33
2.5.1 Teori Implementasi Kebijakan Publik	33
2.5.2 Model Implementasi Kebijakan Grindle	34
2.5.3 Relevansi Teori terhadap Penelitian	35
2.6 Kerangka Pikir Penelitian	35
III. METODOLOGI PENELITIAN	39
3.1 Tipe Penelitian	39
3.2 Fokus Penelitian.....	40
3.3 Lokasi Penelitian.....	40
3.4 Jenis dan Sumber Data Penelitian.....	41
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	43
3.6 Teknik Analisis Data.....	45
3.7 Teknik Keabsahan Data	47
DAFTAR PUSTAKA.....	50

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penyelenggaraan kebijakan publik yang berorientasi pada pelayanan dan keadilan sosial. Salah satu kebijakan nasional yang menjadi perhatian saat ini adalah Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Program ini bertujuan untuk meningkatkan status gizi peserta didik, mendukung kualitas pendidikan, serta mengurangi kesenjangan gizi di berbagai wilayah Indonesia (Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia, 2024). Program ini sekaligus merupakan bentuk komitmen negara dalam memperkuat sumber daya manusia sejak usia dini sebagai investasi pembangunan jangka panjang.

Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa implementasi kebijakan publik tidak selalu berjalan sesuai dengan tujuan idealnya. Seperti halnya pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis di berbagai daerah yang menghadapi tantangan dalam hal pendataan penerima manfaat, distribusi makanan, serta efektivitas koordinasi antarinstansi. Rosidin, Maulana, dan Dharmawan (2025) menemukan bahwa di Provinsi Banten, pelaksanaan program MBG belum sepenuhnya tepat sasaran karena lemahnya integrasi data dan keterlambatan distribusi bantuan. Sementara itu, Santoso, Melianawati, dan Ayuningtyas (2025) menyoroti bahwa kebijakan MBG memerlukan penguatan aspek tata kelola agar pelaksanaannya lebih transparan dan partisipatif sesuai prinsip *good governance*.

Dalam konteks implementasi kebijakan publik, Dunn (2018) menjelaskan bahwa proses implementasi merupakan tahapan krusial dalam siklus kebijakan publik. Setelah kebijakan dirumuskan dan ditetapkan, tahap implementasi berperan penting

dalam memastikan bahwa keputusan politik benar-benar diwujudkan menjadi tindakan nyata di lapangan. Dunn menekankan bahwa implementasi tidak hanya sekadar pelaksanaan teknis, tetapi juga proses yang melibatkan interaksi antara berbagai aktor, baik pembuat kebijakan, pelaksana di birokrasi, maupun kelompok sasaran. Proses ini mencerminkan bagaimana kebijakan diterjemahkan, disesuaikan, dan dijalankan dalam konteks sosial yang beragam agar tujuan kebijakan dapat tercapai.

Lebih lanjut, Dunn (2018) menyebutkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan bergantung pada kejelasan kebijakan, kecukupan sumber daya, dan kondisi lingkungan pelaksanaan. Kejelasan kebijakan mencakup pemahaman bersama antara perumus dan pelaksana kebijakan mengenai tujuan serta strategi pencapaiannya. Sumber daya yang memadai, seperti anggaran, fasilitas, dan kapasitas aparatur, juga menjadi syarat utama agar pelaksanaan berjalan efektif. Sementara itu, kondisi lingkungan, seperti dukungan politik, keadaan sosial ekonomi masyarakat, dan budaya birokrasi, dapat mempengaruhi tingkat keberhasilan implementasi. Dengan kata lain, implementasi kebijakan tidak bisa dilepaskan dari konteks sosial dan politik di mana kebijakan tersebut dijalankan.

Pandangan Dunn tersebut diperkuat oleh Grindle (2017) yang berpendapat bahwa implementasi kebijakan publik merupakan proses yang kompleks dan dipengaruhi oleh dua aspek utama, yaitu isi kebijakan (*content of policy*) dan konteks pelaksanaannya (*context of implementation*). Isi kebijakan mencakup kejelasan tujuan, cakupan sasaran, serta strategi pelaksanaannya. Sementara konteks implementasi melibatkan struktur organisasi pelaksana, kemampuan sumber daya manusia, dan koordinasi antarinstansi yang berperan dalam kebijakan. Grindle juga menyoroti bahwa proses implementasi sering kali bersifat adaptif karena pelaksana di lapangan memiliki ruang interpretasi untuk menyesuaikan kebijakan dengan kondisi lokal yang mereka hadapi.

Dalam praktik pemerintahan daerah, ruang interpretasi ini menjadi sangat penting karena pemerintah daerah memiliki otonomi dalam menyesuaikan kebijakan nasional dengan kebutuhan dan karakteristik wilayahnya. Namun, di sisi lain,

otonomi ini dapat menimbulkan variasi dalam pelaksanaan kebijakan antar daerah, baik dalam hal efektivitas, efisiensi, maupun tingkat partisipasi masyarakat. Grindle (2017) menegaskan bahwa kemampuan birokrasi daerah, dukungan politik, serta keterlibatan masyarakat menjadi faktor penting dalam menentukan apakah suatu kebijakan dapat berjalan sesuai dengan tujuannya.

Apabila dikaitkan dengan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), pandangan Dunn dan Grindle memberikan landasan teoritis yang relevan untuk memahami dinamika kebijakan tersebut di tingkat daerah. Keberhasilan pelaksanaan program MBG sangat bergantung pada kemampuan pemerintah daerah untuk menerjemahkan kebijakan nasional menjadi tindakan nyata di lapangan. Pemerintah daerah tidak hanya bertugas sebagai pelaksana administratif, tetapi juga sebagai aktor yang memiliki peran strategis dalam menentukan arah pelaksanaan, mekanisme pendistribusian, serta pengawasan program agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat.

Kapasitas birokrasi menjadi faktor kunci dalam pelaksanaan kebijakan ini. Aparatur daerah harus memiliki kompetensi dalam manajemen program, pemahaman terhadap pedoman kebijakan, serta kemampuan mengoperasikan sistem digital apabila *e-government* diterapkan dalam pengelolaan data dan pelaporan. Tanpa kemampuan tersebut, proses implementasi berpotensi menghadapi kendala seperti keterlambatan pelaksanaan, ketidaktepatan sasaran, dan lemahnya koordinasi antarinstansi. Selain itu, faktor sosial ekonomi masyarakat, seperti keterbatasan infrastruktur, akses internet, dan tingkat literasi digital, juga berpengaruh terhadap efektivitas pelaksanaan kebijakan.

Kondisi ini dapat diamati di berbagai daerah, termasuk Kabupaten Tulang Bawang, di mana pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis masih menghadapi sejumlah tantangan. Pendataan penerima manfaat yang belum terintegrasi secara elektronik, mekanisme distribusi yang belum seragam, dan lemahnya sinergi antarorganisasi perangkat daerah menunjukkan bahwa implementasi kebijakan masih membutuhkan penguatan tata kelola. Oleh karena itu, analisis terhadap pelaksanaan kebijakan MBG perlu mempertimbangkan bagaimana pemerintah daerah

menjalankan fungsi manajerialnya, memanfaatkan teknologi digital, serta menyesuaikan kebijakan dengan kondisi lokal agar hasilnya optimal.

Perkembangan teknologi informasi saat ini juga menuntut adanya inovasi dalam tata kelola pemerintahan. Melalui penerapan *e-government*, pemerintah berupaya menciptakan birokrasi yang lebih efisien, transparan, dan akuntabel. Sedarmayanti (2017) menyebutkan bahwa *e-government* merupakan instrumen penting dalam mewujudkan *good governance* karena mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mempercepat arus informasi antarinstansi. Hal ini sejalan dengan pandangan Dwiyanto (2018), yang menjelaskan bahwa praktik *good governance* menuntut adanya keterbukaan informasi publik, akuntabilitas kinerja, serta partisipasi masyarakat dalam proses pemerintahan.

Meskipun demikian, berbagai penelitian menunjukkan bahwa penerapan *e-government* di tingkat daerah masih menghadapi kendala. Muhajir, Abdurrahman, dan Hidayatullah (2024) menyebutkan bahwa tantangan terbesar dalam implementasi *e-government* terletak pada keterbatasan infrastruktur teknologi, rendahnya kemampuan sumber daya aparatur, dan kurangnya sinergi antarinstansi. Dalam konteks Kabupaten Tulang Bawang, fenomena serupa juga dapat diamati. Sebagai salah satu daerah yang melaksanakan Program Makan Bergizi Gratis, Tulang Bawang masih menghadapi persoalan seperti data penerima manfaat yang belum terintegrasi, mekanisme pelaporan manual, serta koordinasi birokrasi yang belum efisien.

Melihat kondisi tersebut, menarik untuk meneliti bagaimana tata kelola pemerintah daerah melalui *e-government* dalam implementasi kebijakan Makan Bergizi Gratis di Kabupaten Tulang Bawang. Penelitian ini penting karena akan menggambarkan realitas implementasi kebijakan di tingkat lokal, memahami bagaimana aparatur menjalankan program dalam konteks birokrasi yang dinamis, serta menelaah sejauh mana prinsip *good governance* dapat terwujud melalui penerapan teknologi pemerintahan. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian ini berfokus pada pemaknaan, proses, dan pengalaman aktor birokrasi dalam mengelola kebijakan publik di era digital.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tata kelola pemerintah daerah melalui *e-government* dalam implementasi kebijakan Makan Bergizi Gratis di Kabupaten Tulang Bawang?
2. Apa saja faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaan *e-government* dalam tata kelola kebijakan Makan Bergizi Gratis di Kabupaten Tulang Bawang?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah dijelaskan diatas penelitian ini memiliki tujuan, yaitu:

1. Mendeskripsikan dan menganalisis tata kelola pemerintah daerah melalui *e-government* dalam implementasi kebijakan Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Tulang Bawang.
2. Mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat dalam penerapan *e-government* pada pelaksanaan kebijakan tersebut.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian ilmu administrasi negara, khususnya dalam bidang implementasi kebijakan publik dan tata kelola pemerintahan berbasis teknologi. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memperkaya literatur tentang hubungan antara *e-government* dan prinsip *good governance* di tingkat daerah.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang dalam memperbaiki pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis, khususnya dalam optimalisasi sistem *e-government*, peningkatan kapasitas

aparatur, dan penguatan koordinasi antarinstansi agar pelaksanaan kebijakan menjadi lebih efektif, transparan, dan berkelanjutan.

1.5 Sistematika Penulisan

Secara umum, penulisan skripsi ini disusun dalam beberapa bab sebagai berikut:

1. Bab I Pendahuluan, berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.
2. Bab II Tinjauan Pustaka, menguraikan teori-teori dan hasil penelitian terdahulu yang relevan, seperti teori implementasi kebijakan, konsep *good governance*, dan penerapan *e-government* dalam administrasi publik.
3. Bab III Metodologi Penelitian, menjelaskan pendekatan penelitian, jenis penelitian kualitatif, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data yang digunakan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Keberhasilan implementasi suatu kebijakan publik sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor yang melibatkan banyak aktor dalam pelaksanaannya. Dalam konteks pemerintahan daerah, efektivitas pelaksanaan program pemerintah seperti Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak hanya bergantung pada isi kebijakan, tetapi juga pada bagaimana tata kelola pemerintahan dijalankan. Tata kelola pemerintahan yang baik menuntut adanya transparansi, akuntabilitas, serta kemampuan pemerintah dalam memanfaatkan teknologi informasi untuk menunjang pelayanan publik. Penerapan *e-government* merupakan salah satu langkah penting dalam upaya reformasi birokrasi menuju *good governance*.

Melalui sistem pemerintahan berbasis digital, pemerintah dapat meningkatkan efisiensi pelayanan, mempercepat arus informasi, serta memperkuat partisipasi publik. Namun, pada kenyataannya masih banyak daerah yang menghadapi kendala dalam implementasi kebijakan tersebut, baik karena keterbatasan infrastruktur, sumber daya manusia, maupun koordinasi antarinstansi. Dengan demikian, untuk memahami pelaksanaan kebijakan MBG di daerah seperti Kabupaten Tulang Bawang, diperlukan kajian yang menyeluruh mengenai konsep kebijakan publik, implementasi kebijakan, serta keterkaitannya dengan *e-government* dan *good governance*. Adapun dalam bab ini akan dibahas beberapa komponen utama yang meliputi penelitian terdahulu, tinjauan tentang kebijakan publik, tinjauan tentang *e-government* dan *good governance*, tinjauan tentang kebijakan Program Makan Bergizi Gratis, landasan teori, serta kerangka pikir penelitian.

2.1 Penelitian Terdahulu

Peneliti menggunakan penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya sebagai bahan acuan dan pembanding dalam menyusun penelitian ini. Penelitian terdahulu berfungsi untuk memberikan gambaran mengenai permasalahan sejenis yang telah diteliti, sekaligus menunjukkan posisi penelitian yang sedang dilakukan saat ini. Dengan menelaah penelitian sebelumnya, peneliti dapat menemukan perbedaan, kesenjangan, dan relevansi terhadap penelitian yang akan dilakukan.

Berikut ini adalah beberapa penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan topik penelitian mengenai implementasi kebijakan Makan Bergizi Gratis dan penerapan *e-government* dalam tata kelola pemerintahan daerah:

Tabel 1. Matriks Penelitian Terdahulu

No.	Judul (Nama, Tahun)	Fokus Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Prograam Makan Bergizi Gratis dalam Prespektif Hak Anak dan Kewajiban Negara dalam UUD 1945 (Etika Kumalasari, 2025)	Menganalisis kebijakan program makan siang gratis dari prespektif pemenuhan hak anak dan kewajiban negara menurut UUD 1945.	Hasil penelitian menunjukan bahwa program makan siang gratis merupakan implementasi kewajiban negara terhadap hak anak, namun dalam pelaksanaannya masih memerlukan peningkatan tata kelola dan sinergi antar pemerintah daerah.
2.	Penerapan <i>E-Government</i> dalam peningkatan Pelayanan Publik melalui Aplikasi E-	Mengkaji pelaksanaan <i>e-government</i> melalui aplikasi E-SKM dalam meningkatkan pelayanan publik serta	Hasil penelitian menunjukan bahwa penerapan <i>e-govetment</i> melalui aplikasi E-SKM sudah cukup baik namun

	SKM di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar Provinsi Riau (Surya Gilang Ananda, 2023)	mengidentifikasi faktor penghambatnya.	belum bisa terlaksana optimal karena terdapat hambatan internal dan eksternal, seperti kurangnya sosialisasi dan keterbatasan aset yang dimiliki di daerah tersebut.
3.	Penerapan <i>E-Government</i> dalam Pelayanan Publik di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan (Ratnika Juliany Ramadhan, 2022)	Menganalisis penerapan <i>e-government</i> dalam pelayanan publik serta faktor-faktor yang mendukung dan menghambat penerapannya di DPMPTSP Provinsi Sulawesi Selatan.	Hasil penelitianmenunukan bahwa penerapan <i>e-government</i> sudah berjalan dengan baik meskipun masih menghadapi kendala seperti kurangnya sosialisasi dan keterbatasan SDM.

Berdasarkan tabel penelitian terdahulu di atas, ketiga penelitian memiliki relevansi yang erat dengan penelitian ini. Penelitian pertama oleh Etika Kumalasari (2025) memberikan landasan normatif mengenai kebijakan MBG dari sudut pandang hak anak dan kewajiban negara, tetapi belum mengkaji aspek implementasi di tingkat daerah. Penelitian kedua oleh Surya Gilang Ananda (2020) dari IPDN menyoroti penerapan *e-government* sebagai instrumen peningkatan pelayanan publik dan menegaskan pentingnya kesiapan birokrasi dalam transformasi digital. Penelitian ketiga oleh Ratnika Juliany Ramadhan (2022) menambahkan perspektif tentang faktor pendukung dan penghambat dalam penerapan *e-government* di pemerintahan daerah. Dari hasil perbandingan tersebut, penelitian ini berupaya untuk

mengembangkan hasil penelitian terdahulu dengan menggabungkan dua fokus utama, yaitu implementasi kebijakan publik dan penerapan *e-government* dalam konteks tata kelola pemerintahan daerah. Penelitian ini berupaya menjawab sejauh mana penerapan *e-government* dapat mendukung keberhasilan implementasi Program Makan Bergizi Gratis di Kabupaten Tulang Bawang.

2.2 Tinjauan tentang Kebijakan Publik

Kebijakan publik merupakan salah satu konsep sentral dalam studi administrasi negara dan ilmu kebijakan publik karena menjadi instrumen utama negara dalam merespon masalah-masalah kolektif masyarakat. Secara konseptual, kebijakan publik bukan sekadar peraturan atau keputusan resmi, melainkan rangkaian tindakan yang dirancang dan dilaksanakan oleh aktor-aktor publik untuk mencapai tujuan tertentu yang terkait kepentingan umum (Dunn, 2018). Pandangan ini menempatkan kebijakan sebagai proses sosial-politik yang melibatkan tahap perumusan, pengambilan keputusan, implementasi, dan evaluasi. Karena itu, kajian kebijakan publik harus memperhatikan aspek isi kebijakan, aktor yang terlibat, institusi pembuat kebijakan, serta konteks sosial-ekonomi di mana kebijakan itu dijalankan.

2.2.1 Definisi Kebijakan Publik menurut Para Ahli

Dunn (2018) mendefinisikan kebijakan publik sebagai “serangkaian keputusan yang saling berkaitan yang dihasilkan oleh lembaga-lembaga pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu melalui tindakan kolektif.” Definisi ini menegaskan dua hal penting: pertama, kebijakan adalah keputusan yang sistematis dan saling terkait; kedua, kebijakan diarahkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara kolektif. Pendekatan Dunn menempatkan proses pembuatan kebijakan dalam kerangka rasional-sistemik dimana tujuan, alat, dan sumber daya dikaitkan agar hasil kebijakan dapat diukur. Dengan demikian, bagi Dunn fokus utama kajian kebijakan adalah proses pembuatan dan implementasi yang logis serta berkaitan erat dengan analisis tujuan, alternatif kebijakan, dan mekanisme pelaksanaan.

Grindle (2017) memberikan perspektif kritis yang melengkapi pandangan Dunn dengan menekankan pentingnya konteks implementasi dalam menilai keberhasilan kebijakan. Menurut Grindle, keberhasilan kebijakan tidak hanya tergantung pada kualitas rancangan kebijakan (*content of policy*), tetapi juga sangat ditentukan oleh konteks pelaksanaannya (*context of implementation*) yang meliputi kapasitas birokrasi, kondisi politik lokal, sumber daya, serta dinamika sosial-ekonomi. Pendekatan Grindle menggarisbawahi bahwa implementasi kebijakan adalah proses adaptif pelaksana di lapangan sering kali harus menafsirkan dan menyesuaikan kebijakan dengan realitas lokal sehingga hasil yang dicapai bisa berbeda antar wilayah. Oleh karena itu, kajian kebijakan publik mutlak memasukkan analisis konteks untuk memahami variabilitas hasil implementasi.

Suharto (2015) menempatkan kebijakan publik dalam ranah kebijakan sosial dan menekankan nilai-nilai kesejahteraan sebagai tujuan utama kebijakan tersebut. Bagi Suharto, kebijakan sosial seperti program pangan, pendidikan, atau kesehatan bukan sekadar alokasi sumber daya, melainkan juga manifestasi nilai sosial dan kewajiban negara untuk memenuhi kebutuhan dasar warga. Suharto menekankan pentingnya aspek normatif dan hak asasi dalam perumusan kebijakan sosial sehingga kebijakan tidak hanya efektif secara teknis tetapi juga adil dan legitim. Pandangan ini relevan ketika menganalisis program Makan Bergizi Gratis, karena selain mempertimbangkan mekanisme operasional, perlu juga mengkaji dasar hak dan kewajiban negara terhadap pemenuhan gizi anak.

Sutaryo (2019) menambahkan dimensi prosedural dan teknis dengan memberi perhatian pada tahapan siklus kebijakan: identifikasi masalah, perumusan agenda, formulasi kebijakan, implementasi, serta evaluasi. Sutaryo menegaskan bahwa setiap tahap memiliki output dan persyaratan sumber daya tersendiri sehingga kegagalan di salah satu tahap dapat berdampak pada keseluruhan proses. Menurutnya, khususnya tahap implementasi sering menjadi titik kritis karena memerlukan koordinasi antar lembaga, alokasi sumber daya yang tepat, dan mekanisme pengawasan yang efektif. Dengan demikian, kajian kebijakan publik yang komprehensif harus memadukan aspek normatif (mengapa kebijakan itu

penting), teknis (bagaimana kebijakan dirancang), dan praktis (bagaimana kebijakan dijalankan dan dievaluasi).

2.2.2 Karakteristik dan Kategori Kebijakan Publik

Kebijakan publik memiliki sejumlah karakteristik yang membedakannya dari keputusan organisasi biasa; antara lain kebijakan berskala kolektif, legitimasinya berasal dari struktur negara, dan dampaknya meluas hingga ke masyarakat umum. Dunn (2018) menegaskan bahwa kebijakan publik biasanya bersifat multidimensi karena memengaruhi berbagai sektor dan memerlukan koordinasi antar lembaga. Karakteristik ini menjelaskan mengapa kebijakan publik sering menuntut prosedur formal, konsultasi publik, serta mekanisme akuntabilitas yang jelas. Selain itu, kebijakan publik kerap dibedakan menjadi beberapa kategori utama yang masing-masing memiliki tujuan, karakteristik, serta implikasi pelaksanaan yang berbeda terhadap masyarakat. Klasifikasi ini membantu memahami peran kebijakan dalam sistem pemerintahan serta efeknya terhadap distribusi sumber daya publik. Adapun kategori tersebut meliputi:

1. Kebijakan Distributif (*Distributive Policy*)

Kebijakan distributif adalah kebijakan yang bertujuan untuk memberikan manfaat atau alokasi sumber daya tertentu kepada kelompok masyarakat tanpa mengurangi hak pihak lain. Biasanya kebijakan ini bersifat positif dan jarang menimbulkan konflik karena manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat luas. Contoh kebijakan distributif antara lain pembangunan fasilitas publik seperti sekolah, puskesmas, atau penyediaan bantuan pendidikan. Dalam konteks penelitian ini, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) termasuk dalam kategori kebijakan distributif karena memberikan manfaat langsung berupa penyediaan makanan bergizi bagi anak-anak sekolah dasar dan menengah.

2. Kebijakan Regulatf (*Regulatory Policy*)

Kebijakan regulatif adalah kebijakan yang menetapkan aturan, standar, atau batasan terhadap perilaku masyarakat atau pelaku ekonomi. Tujuannya untuk menjaga ketertiban, mencegah penyalahgunaan wewenang, serta melindungi kepentingan publik. Kebijakan ini biasanya bersifat mengatur dan mengikat, misalnya dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah, atau keputusan kepala daerah. Contohnya seperti peraturan tentang standar gizi, keamanan pangan, atau tata cara pelaksanaan program sosial agar sesuai prosedur dan tidak disalahgunakan.

3. Kebijakan Redistributif (*Redistributive Policy*)

Kebijakan redistributif bertujuan untuk mengalihkan atau mendistribusikan kembali sumber daya dari kelompok tertentu ke kelompok lain demi tercapainya keadilan sosial. Jenis kebijakan ini sering kali menimbulkan perdebatan karena melibatkan pengalihan sumber daya atau subsidi. Contohnya adalah kebijakan bantuan sosial, subsidi pangan, dan program pengentasan kemiskinan. Program Makan Bergizi Gratis juga dapat dipandang sebagai kebijakan redistributif karena sumber pembiayaannya berasal dari anggaran negara dan dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat berpendapatan rendah.

4. Kebijakan Konstitutif (*Constitutive Policy*)

Kebijakan konstitutif adalah kebijakan yang mengatur struktur, fungsi, dan prosedur lembaga pemerintahan itu sendiri. Kebijakan ini berfungsi membentuk dasar kelembagaan yang memungkinkan kebijakan publik lain dapat dijalankan secara efektif. Contohnya seperti pembentukan badan pengelola program, perubahan struktur organisasi pemerintah daerah, atau peraturan tentang pelimpahan kewenangan kepada dinas tertentu. Dalam konteks MBG, kebijakan konstitutif muncul ketika pemerintah daerah menetapkan peraturan daerah atau keputusan bupati mengenai struktur pelaksana program dan tanggung jawab antarinstansi.

2.2.3 Tahapan Siklus Kebijakan dan Implikasinya bagi Implementasi

Siklus kebijakan adalah kerangka analitis yang membantu menjelaskan perjalanan sebuah kebijakan dari pengenalan masalah hingga evaluasi hasil. Sutaryo (2019) merinci tahapan tersebut sebagai: identifikasi masalah, agenda setting, formulasi kebijakan, implementasi, dan evaluasi. Pada tahap identifikasi masalah, aktor-aktor publik mengumpulkan bukti dan membangun narasi mengenai urgensi isu; pada tahap agenda setting, isu tersebut bersaing untuk masuk dalam prioritas pemerintah; pada tahap formulasi, solusi dirancang dan mekanisme diusulkan; tahap implementasi menuntut operasi teknis dan koordinasi; sedangkan evaluasi menilai efektivitas dan efisiensi kebijakan. Pemahaman menyeluruh atas tiap tahap ini membantu peneliti dan pembuat kebijakan mengidentifikasi titik-titik rapuh yang berpotensi menggagalkan tujuan kebijakan.

Dunn (2018) menekankan bahwa masalah paling banyak muncul pada tahap implementasi karena di sinilah kebijakan yang abstrak harus diterjemahkan ke tindakan praktis. Tahapan implementasi memerlukan penetapan tanggung jawab pelaksana, prosedur operasional, alokasi anggaran, serta sistem monitoring dan pelaporan. Dalam banyak kasus, kelemahan pada desain organisasi pelaksana atau ketidakcukupan sumber daya manusia dan finansial menjadi penyebab kegagalan. Oleh karena itu, desain kebijakan yang baik harus memikirkan aspek-aspek kemampuan implementasi sejak awal sehingga reduksi gap antara tujuan dan hasil dapat diminimalkan.

2.2.4 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan (Dunn dan Grindle)

Dalam studi kebijakan publik, keberhasilan implementasi sering kali tidak hanya ditentukan oleh kejelasan isi kebijakan, tetapi juga oleh faktor-faktor pendukung yang kompleks di lapangan. Baik Dunn (2018) maupun Grindle (2017) memberikan kerangka analitis yang komprehensif untuk memahami berbagai elemen yang memengaruhi efektivitas implementasi suatu kebijakan. Mereka menekankan bahwa implementasi kebijakan merupakan proses dinamis yang

melibatkan berbagai aktor, sumber daya, serta interaksi sosial dan politik yang saling berkaitan. Menurut Dunn (2018), terdapat tiga elemen utama yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan publik, yaitu:

1. Kejelasan kebijakan (*policy clarity*)

Kejelasan kebijakan berkaitan dengan sejauh mana tujuan, sasaran, dan mekanisme kebijakan dirumuskan secara konkret dan mudah dipahami oleh pelaksana di lapangan. Semakin jelas perumusan kebijakan, semakin kecil kemungkinan terjadinya salah tafsir di antara aktor pelaksana. Ketidakjelasan tujuan sering menimbulkan ambiguitas dan kebingungan dalam menentukan prioritas implementasi, sehingga dapat menghambat pencapaian hasil kebijakan.

2. Ketersediaan sumber daya (*resources availability*)

Implementasi kebijakan sangat bergantung pada tersedianya sumber daya yang memadai, baik berupa dana, infrastruktur, maupun sumber daya manusia yang kompeten. Sumber daya yang tidak mencukupi dapat menyebabkan kebijakan berhenti pada tataran wacana tanpa mampu dijalankan secara efektif. Dalam konteks pemerintahan daerah, keterbatasan anggaran dan SDM sering menjadi kendala utama yang menghambat pelaksanaan program sosial.

3. Kondisi lingkungan atau konteks (*policy environment*)

Lingkungan sosial, politik, dan ekonomi menjadi faktor eksternal yang turut memengaruhi keberhasilan implementasi. Dukungan politik dari pimpinan daerah, kestabilan sosial, serta struktur kelembagaan yang responsif akan memperkuat efektivitas pelaksanaan kebijakan. Sebaliknya, resistensi masyarakat, konflik antarinstansi, atau lemahnya sistem birokrasi dapat memperlambat implementasi.

Sementara itu, Grindle (2017) memperluas analisis Dunn dengan menyoroti dimensi politik dan kelembagaan dalam proses implementasi. Menurutny,

pelaksanaan kebijakan publik sering kali terganggu oleh adanya ruang interpretasi di tingkat birokrasi, perbedaan kepentingan antaraktor, serta dinamika politik lokal yang memengaruhi jalannya kebijakan. Grindle menekankan bahwa kapasitas birokrasi (*capacity to implement*) menjadi elemen penting yang mencakup:

1. Kemampuan teknis pelaksana, yaitu sejauh mana aparaturnya memiliki keterampilan, pengetahuan, dan alat pendukung yang dibutuhkan untuk menjalankan kebijakan.
2. Koordinasi antarorganisasi, meliputi kemampuan instansi untuk bekerja sama lintas sektor tanpa tumpang tindih kewenangan atau konflik peran.
3. Legitimasi politik dan sosial, yaitu tingkat penerimaan dan dukungan masyarakat terhadap kebijakan yang dijalankan pemerintah.

Kedua tokoh ini sepakat bahwa faktor komunikasi kebijakan juga berperan penting dalam menjamin efektivitas implementasi. Arus informasi yang tidak lancar antara pembuat kebijakan, pelaksana, dan masyarakat dapat menimbulkan miskomunikasi, resistensi, bahkan kegagalan program. Secara keseluruhan, Dunn (2018) dan Grindle (2017) menggarisbawahi perlunya mekanisme *feedback* dan sistem pengawasan yang adaptif agar kebijakan publik dapat menyesuaikan diri dengan perubahan situasi lapangan. Implementasi yang sukses bukan hanya diukur dari tingkat ketaatan pelaksana terhadap pedoman teknis, tetapi juga dari kemampuan organisasi pemerintah dalam belajar, beradaptasi, dan memperbaiki prosesnya secara berkelanjutan. Dengan demikian, kebijakan publik dapat dijalankan secara efektif, efisien, dan berorientasi pada hasil yang bermanfaat bagi masyarakat.

2.3 Tinjauan tentang Program Makan Bergizi Gratis (MBG)

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan salah satu kebijakan sosial pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas gizi anak-anak sekolah serta memperkuat ketahanan pangan keluarga berpendapatan rendah. Kebijakan ini merupakan bentuk komitmen negara dalam upaya menurunkan angka stunting dan memperbaiki kualitas sumber daya manusia Indonesia. Menurut Rosidin, Maulana,

dan Dharmawan (2025), program MBG dirancang untuk menyediakan makanan bergizi bagi siswa sekolah dasar dan menengah agar dapat menunjang pertumbuhan fisik, perkembangan kognitif, dan kehadiran siswa di sekolah. Dengan demikian, kebijakan MBG tidak hanya berfungsi sebagai program bantuan sosial, tetapi juga sebagai investasi jangka panjang dalam pembangunan manusia.

2.3.1 Pengertian Program Makan Bergizi Gratis (MBG)

Secara konseptual, Program Makan Bergizi Gratis merupakan kebijakan pemerintah yang memberikan makanan bergizi kepada peserta didik secara gratis dengan tujuan meningkatkan status gizi anak dan menekan angka malnutrisi. Santoso, Melianawati, dan Ayuningtyas (2025) menjelaskan bahwa program MBG berlandaskan pada prinsip pemenuhan hak dasar anak atas gizi yang cukup dan seimbang. Kebijakan ini menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah, sekolah, serta masyarakat dalam menyediakan makanan bergizi sesuai dengan standar kesehatan.

Menurut Nooraini, Ling, dan Asmorowati (2025), MBG bukan hanya program sosial semata, tetapi juga instrumen kebijakan publik yang bersifat distributif, karena manfaatnya diberikan langsung kepada kelompok sasaran tanpa mengurangi hak pihak lain. MBG juga mengandung nilai-nilai *good governance* karena pelaksanaannya menuntut adanya transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat. Sementara itu, Lendra, Husni, dan Fitriani (2025) menyebutkan bahwa MBG memiliki dimensi keadilan sosial yang kuat karena menitikberatkan pada pemerataan kesempatan bagi seluruh anak Indonesia untuk memperoleh asupan gizi yang layak.

2.3.2 Latar Belakang dan Landasan Hukum Pelaksanaan Program MBG

Kebijakan MBG dilatarbelakangi oleh kondisi gizi masyarakat Indonesia yang masih menghadapi permasalahan serius. Terutama tingginya angka stunting dan kurang gizi pada anak usia sekolah. Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kementerian Kesehatan, prevalensi stunting di beberapa provinsi masih

di atas 20 persen, yang menandakan perlunya intervensi sistemik melalui kebijakan nasional yang berkelanjutan. Menurut Rahmawati, Prasetyo, dan Ramadhani (2024), kebijakan MBG merupakan manifestasi dari visi pembangunan manusia Indonesia yang tertuang dalam arah kebijakan nasional pemerintahan 2024–2029, di mana isu peningkatan kualitas gizi menjadi prioritas utama.

Program ini juga memiliki dasar hukum yang kuat karena sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020–2024, yang menekankan pentingnya pembangunan sumber daya manusia unggul melalui pemenuhan kebutuhan dasar seperti pangan dan gizi. Selain itu, MBG juga merupakan tindak lanjut dari komitmen global Indonesia terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*), khususnya pada tujuan kedua yaitu “Mengakhiri Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan, dan Meningkatkan Gizi.” Dengan demikian, kebijakan ini tidak hanya berorientasi pada kesejahteraan lokal, tetapi juga menjadi bagian dari tanggung jawab Indonesia dalam mewujudkan pembangunan global yang berkeadilan dan berkelanjutan (Lendra et al., 2025).

2.3.3 Tujuan dan Sasaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG)

Tujuan utama dari Program Makan Bergizi Gratis adalah meningkatkan kualitas gizi anak-anak sekolah dasar dan menengah agar tumbuh sehat, cerdas, dan produktif. Fitri, Indriyani, dan Hidayat (2023) menyatakan bahwa gizi yang baik memiliki dampak langsung terhadap peningkatan kemampuan belajar, konsentrasi, serta daya tahan tubuh anak. Oleh karena itu, pelaksanaan MBG tidak hanya diarahkan untuk menyediakan makanan, tetapi juga untuk membentuk kebiasaan makan sehat dan perilaku hidup bersih sejak usia dini. Program ini menjadi salah satu instrumen penting dalam pembangunan sumber daya manusia berkelanjutan di Indonesia.

Selain itu, Santoso et al. (2025) menekankan bahwa program MBG memiliki tujuan turunan yang lebih luas, yaitu menurunkan angka ketidakhadiran siswa akibat

kekurangan gizi, memperkuat semangat belajar, serta membantu mengurangi beban pengeluaran keluarga miskin. Dengan adanya program ini, diharapkan anak-anak dari keluarga tidak mampu tetap memperoleh hak yang sama untuk mendapatkan makanan bergizi di sekolah. Kebijakan ini sekaligus mendukung pemerataan kesejahteraan dan mencerminkan upaya pemerintah dalam menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Secara umum, tujuan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis dapat dirinci sebagai berikut:

1. Meningkatkan status gizi anak-anak sekolah, khususnya di daerah dengan tingkat stunting dan kemiskinan yang tinggi.
2. Mendorong peningkatan konsentrasi belajar dan prestasi akademik siswa melalui pemenuhan kebutuhan gizi harian yang seimbang.
3. Menurunkan angka ketidakhadiran dan putus sekolah akibat masalah gizi atau ekonomi keluarga.
4. Membentuk kebiasaan makan sehat sejak usia dini dan meningkatkan kesadaran gizi di lingkungan sekolah dan keluarga.
5. Meringankan beban ekonomi keluarga berpenghasilan rendah, terutama di daerah tertinggal, terluar, dan terdepan (3T).
6. Meningkatkan partisipasi masyarakat dan lembaga pendidikan dalam menciptakan lingkungan belajar yang sehat dan mendukung tumbuh kembang anak.

Sasaran utama dari program ini adalah peserta didik sekolah dasar dan menengah yang berasal dari keluarga berpenghasilan rendah. Namun, dalam pelaksanaannya, pemerintah juga dapat memperluas sasaran kepada anak-anak rentan lainnya seperti anak yatim, anak jalanan, atau siswa yang tinggal di daerah terpencil. Dengan demikian, Program MBG tidak hanya sekadar program bantuan pangan, tetapi juga merupakan strategi intervensi sosial untuk mengatasi ketimpangan gizi dan memperkuat pembangunan manusia di tingkat daerah.

2.3.4 Mekanisme Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG)

Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dilakukan melalui sinergi lintas sektor antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, sekolah, dan masyarakat. Menurut Rosidin, Maulana, dan Dharmawan (2025), mekanisme pelaksanaan program dimulai dari pendataan calon penerima manfaat berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), kemudian dilanjutkan dengan perencanaan menu makanan, pengadaan bahan pangan dari penyedia lokal, serta proses distribusi dan pengawasan oleh instansi terkait. Pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam mengatur jadwal pemberian makanan, jenis menu, serta sistem pelaporan dan evaluasi sesuai dengan kondisi dan kebutuhan daerah masing-masing.

Santoso et al. (2025) menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan MBG terdapat beberapa prinsip dasar yang menjadi pedoman, yaitu keberlanjutan, partisipasi, dan akuntabilitas.

- 1) Keberlanjutan berarti program harus dilakukan secara rutin dan konsisten untuk memberikan dampak jangka panjang bagi peningkatan gizi anak-anak.
- 2) Partisipasi menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat, terutama orang tua, guru, dan komunitas sekolah, agar program berjalan sesuai kebutuhan lokal.
- 3) Akuntabilitas menuntut transparansi dalam penggunaan anggaran, distribusi makanan, serta pelaporan hasil pelaksanaan agar publik dapat ikut mengawasi jalannya program.

Menurut Lendra, Husni, dan Fitriani (2025), pengawasan terhadap pelaksanaan MBG sangat penting untuk memastikan kualitas makanan dan ketepatan sasaran. Dalam konteks ini, penerapan *e-government* berperan sebagai instrumen digital yang strategis untuk memperkuat proses pelaporan, monitoring, serta evaluasi pelaksanaan program. Melalui sistem digital, pemerintah daerah dapat memantau secara langsung kegiatan di sekolah, mengevaluasi efektivitas penyaluran, dan memastikan distribusi makanan tepat waktu serta tepat jumlah.

Agar pelaksanaan program MBG berjalan efektif, beberapa aspek penting yang perlu diperhatikan pemerintah daerah antara lain:

1. Perencanaan program yang matang, termasuk penetapan menu sesuai standar gizi, estimasi biaya, dan jadwal pelaksanaan.
2. Pendataan penerima manfaat yang akurat, berbasis DTKS dan diverifikasi oleh sekolah serta dinas sosial.
3. Pengadaan bahan makanan dari penyedia lokal, guna mendukung ekonomi daerah dan menjaga kualitas bahan pangan segar.
4. Pelibatan berbagai pihak seperti guru, tenaga kesehatan, dan masyarakat dalam proses penyediaan dan distribusi.
5. Pengawasan dan evaluasi berkala oleh pemerintah daerah dengan dukungan sistem e-reporting berbasis teknologi informasi.
6. Peningkatan kapasitas aparatur pelaksana melalui pelatihan tentang standar gizi, manajemen logistik, serta penggunaan aplikasi e-government untuk pelaporan.

Selain memperhatikan aspek teknis, penting juga bagi pemerintah untuk membangun sistem komunikasi dan koordinasi antarinstansi yang kuat. Nooraini et al. (2025) menegaskan bahwa keberhasilan implementasi program MBG sangat bergantung pada koordinasi antara dinas pendidikan, kesehatan, dan sosial sebagai pelaksana teknis. Dengan adanya koordinasi dan transparansi data berbasis digital, diharapkan program MBG dapat berjalan efektif, tepat sasaran, serta memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

2.3.5 Permasalahan dan Tantangan Implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG)

Meskipun Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dirancang sebagai kebijakan strategis untuk meningkatkan kualitas gizi dan kesejahteraan anak-anak sekolah, pelaksanaannya di berbagai daerah masih menghadapi sejumlah kendala yang cukup kompleks. Beragam tantangan ini tidak hanya berasal dari aspek teknis, tetapi juga mencakup dimensi kelembagaan, sosial, ekonomi, dan politik. Rosidin,

Maulana, dan Dharmawan (2025) menemukan bahwa tantangan utama dalam pelaksanaan program MBG di tingkat daerah antara lain keterlambatan distribusi makanan, ketidaktepatan data penerima manfaat, serta lemahnya koordinasi antarinstansi pelaksana. Permasalahan tersebut sering kali bersumber dari keterbatasan kapasitas birokrasi daerah, minimnya infrastruktur pendukung, serta lemahnya sistem pengawasan dan evaluasi yang berkelanjutan.

Menurut Santoso, Melianawati, dan Ayuningtyas (2025), perbedaan kapasitas fiskal antar daerah juga sangat berpengaruh terhadap efektivitas pelaksanaan MBG. Daerah dengan kemampuan anggaran yang kuat dapat menyediakan bahan makanan berkualitas dan mendukung logistik distribusi dengan baik. Sementara daerah dengan anggaran terbatas cenderung mengalami kesulitan dalam memenuhi standar kualitas dan frekuensi pemberian makanan bergizi. Selain itu, rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan juga menjadi hambatan serius yang mengurangi transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan kebijakan.

Sementara itu, Nooraini, Ling, dan Asmorowati (2025) menegaskan bahwa keberhasilan MBG sangat bergantung pada kualitas komunikasi antaraktor kebijakan, baik di tingkat pusat maupun daerah. Kurangnya koordinasi dan integrasi data antar dinas seperti dinas pendidikan, kesehatan, dan sosial sering kali menimbulkan tumpang tindih kewenangan dan kesulitan dalam proses evaluasi program. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan MBG membutuhkan sistem tata kelola yang adaptif, partisipatif, dan berbasis digital untuk menjamin efektivitas implementasi. Secara lebih rinci, permasalahan dan tantangan implementasi Program MBG dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1. Permasalahan Teknis dan Operasional

- 1) Keterlambatan distribusi makanan akibat kendala logistik, terutama di daerah terpencil atau dengan akses jalan yang sulit.
- 2) Kualitas makanan yang tidak seragam karena kurangnya standar menu dan pengawasan mutu di tingkat pelaksana.
- 3) Kurangnya fasilitas penyimpanan dan pengolahan makanan yang memadai di sekolah.

2. Permasalahan Administratif dan Data
 - 1) Ketidaktepatan data penerima manfaat yang menyebabkan kesalahan sasaran dan ketidakadilan distribusi bantuan.
 - 2) Lemahnya sistem informasi dan basis data terpadu antara pemerintah daerah dan pusat.
 - 3) Proses pelaporan manual yang rentan terhadap keterlambatan dan kesalahan input data.
3. Permasalahan Kelembagaan dan Koordinasi
 - 1) Kurangnya koordinasi lintas sektor antara dinas terkait (pendidikan, kesehatan, sosial, dan ketahanan pangan).
 - 2) Tumpang tindih kewenangan antarinstansi yang menyebabkan inefisiensi dalam pelaksanaan program.
 - 3) Minimnya mekanisme monitoring dan evaluasi berbasis data *real-time*.
4. Permasalahan Sosial dan Partisipasi Masyarakat
 - 1) Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya gizi seimbang, sehingga dukungan terhadap program belum optimal.
 - 2) Minimnya pelibatan masyarakat dan komite sekolah dalam pengawasan pelaksanaan program.
 - 3) Kurangnya komunikasi publik yang efektif untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap program pemerintah.
5. Permasalahan Sumber Daya dan Pendanaan
 - 1) Keterbatasan anggaran di beberapa daerah menyebabkan program tidak dapat berjalan secara rutin.
 - 2) Ketergantungan pada bantuan pusat tanpa mekanisme pembiayaan daerah yang mandiri.
 - 3) Kurangnya tenaga pelaksana yang memiliki kompetensi di bidang gizi dan manajemen program sosial.
6. Permasalahan Teknologi dan Pengawasan Digital
 - 1) Belum optimalnya pemanfaatan e-government dalam pelaporan, pengawasan, dan evaluasi program.

- 2) Rendahnya literasi digital di kalangan pelaksana program yang menghambat implementasi sistem pelaporan berbasis daring.
- 3) Tidak adanya sistem digital yang terintegrasi antar instansi pemerintah daerah untuk pemantauan penerima manfaat.

Dengan melihat berbagai kendala tersebut, dapat disimpulkan bahwa implementasi Program Makan Bergizi Gratis memerlukan pendekatan tata kelola yang kolaboratif dan berbasis teknologi informasi. Penerapan prinsip *good governance* seperti transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas menjadi penting untuk memperbaiki efektivitas pelaksanaan. Penguatan kapasitas aparatur, perbaikan sistem data penerima manfaat, serta penggunaan *e-government* dalam proses pelaporan dan pengawasan merupakan langkah yang krusial agar program MBG dapat mencapai tujuannya secara optimal di seluruh daerah, termasuk Kabupaten Tulang Bawang.

2.3.6 Relevansi Program MBG terhadap Tata Kelola Pemerintahan Daerah

Program MBG tidak hanya relevan sebagai kebijakan sosial, tetapi juga menjadi cerminan kapasitas tata kelola pemerintahan daerah dalam mengelola kebijakan publik secara efektif. Dwiyanto (2018) menegaskan bahwa salah satu indikator *good governance* adalah kemampuan pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas, transparan, dan tepat sasaran. Oleh karena itu, implementasi MBG menjadi indikator nyata sejauh mana birokrasi daerah mampu menerapkan prinsip efisiensi, partisipasi, dan akuntabilitas. Sedarmayanti (2017) menyebutkan bahwa birokrasi daerah yang responsif dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat merupakan prasyarat utama bagi keberhasilan pelaksanaan kebijakan sosial.

Dalam konteks ini, penggunaan *e-government* dapat memperkuat mekanisme pengawasan dan pelaporan pelaksanaan MBG agar lebih terbuka dan terukur. Melalui integrasi sistem informasi, pemerintah daerah dapat memperbaiki proses pendataan penerima, mempercepat distribusi, serta meminimalisir potensi penyimpangan anggaran. Dengan demikian, pelaksanaan Program Makan Bergizi

Gratis di Kabupaten Tulang Bawang dapat dijadikan ukuran untuk menilai sejauh mana tata kelola pemerintahan daerah mampu mengimplementasikan prinsip *good governance* berbasis digital. Program ini menjadi momentum bagi pemerintah daerah untuk menunjukkan kinerja birokrasi yang profesional, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkeadilan.

2.4 Tinjauan tentang E-Government dan Good Governance

2.4.1 Pengertian E-Government

Konsep *Electronic Government* atau *e-government* muncul sebagai respons terhadap tuntutan modernisasi administrasi publik dan kebutuhan masyarakat akan layanan pemerintahan yang cepat, transparan, serta efisien. Rachmad et al. (2024) mendefinisikan *e-government* sebagai proses pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi oleh lembaga pemerintah untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, transparansi, dan partisipasi publik dalam penyelenggaraan pemerintahan. Melalui penerapan sistem digital, aktivitas birokrasi dapat dilakukan lebih terbuka dan akuntabel, sehingga memperkuat hubungan antara pemerintah dan masyarakat.

Menurut Muhajir, Abdurrahman, dan Hidayatullah (2024), *e-government* bukan sekadar penggunaan komputer atau internet dalam pekerjaan administrasi, tetapi transformasi menyeluruh terhadap pola kerja birokrasi menuju tata kelola yang berbasis data dan teknologi. Dengan *e-government*, proses pelayanan publik dapat dilakukan secara daring, data administrasi dapat terintegrasi, dan pengawasan dapat dilakukan secara *real-time*.

Sementara itu, Sedarmayanti (2017) menekankan bahwa *e-government* merupakan bagian dari upaya reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Penggunaan teknologi memungkinkan efisiensi waktu dan biaya, memperkecil potensi penyimpangan, dan meningkatkan aksesibilitas informasi bagi masyarakat. Dengan demikian, *e-government* bukan hanya alat teknis, tetapi juga instrumen untuk memperkuat nilai-nilai transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan.

2.4.2 Tujuan dan Manfaat E-Government

Penerapan *e-government* memiliki berbagai tujuan strategis dalam upaya peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan. Tujuan utamanya adalah menciptakan birokrasi yang efisien, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dwiyanto (2018) menjelaskan bahwa *e-government* dapat memperpendek rantai birokrasi dan mempercepat proses pelayanan publik melalui digitalisasi administrasi. Selain itu, penggunaan teknologi informasi juga memperluas akses masyarakat terhadap layanan pemerintah.

Secara umum, tujuan utama penerapan *e-government* adalah:

1. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemerintahan melalui otomatisasi proses kerja dan pelayanan publik berbasis digital.
2. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dengan memberikan akses informasi publik secara terbuka.
3. Memperkuat partisipasi masyarakat dalam proses pemerintahan melalui platform digital yang memungkinkan masyarakat memberikan aspirasi dan pengawasan.
4. Meningkatkan kualitas layanan publik agar lebih cepat, murah, dan mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.
5. Mendukung koordinasi antarinstansi pemerintah melalui integrasi sistem informasi lintas lembaga dan tingkat pemerintahan.

Manfaat penerapan *e-government* tidak hanya dirasakan oleh lembaga pemerintah, tetapi juga oleh masyarakat secara luas. Putra, Putra, dan Juliana (2020) menyebutkan bahwa *e-government* mampu menekan biaya operasional birokrasi, meminimalkan praktik korupsi, serta mempercepat pengambilan keputusan. Selain itu, masyarakat memperoleh kemudahan dalam mengakses layanan publik, baik di bidang pendidikan, kesehatan, maupun administrasi kependudukan.

2.4.3 Prinsip dan Komponen E-Government

Agar penerapan *e-government* berjalan optimal, terdapat sejumlah prinsip dan komponen dasar yang harus diperhatikan. Menurut Pertiwi, Dema, Mustanir, dan

Anugrah (2021), prinsip-prinsip dasar *e-government* meliputi transparansi, partisipasi, efisiensi, keandalan, dan akuntabilitas. Prinsip-prinsip tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Transparansi, yaitu keterbukaan pemerintah dalam menyampaikan informasi publik melalui media digital agar masyarakat dapat mengaksesnya secara mudah.
2. Partisipasi, yakni melibatkan masyarakat dalam pengawasan, penilaian, dan penyusunan kebijakan melalui sarana daring.
3. Efisiensi, mencakup penggunaan sumber daya secara optimal untuk menghasilkan pelayanan publik yang cepat dan murah.
4. Keandalan (*reliability*), memastikan bahwa sistem *e-government* dapat beroperasi secara stabil, aman, dan responsif.
5. Akuntabilitas, menjamin setiap aktivitas pemerintahan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka.

Selain prinsip, Amirullah et al. (2023) menguraikan empat komponen utama yang membentuk *e-government*, yaitu:

1. Infrastruktur Teknologi Informasi, meliputi jaringan internet, perangkat keras, dan perangkat lunak.
2. Sumber Daya Manusia, yakni aparatur yang memiliki kemampuan teknis dan pemahaman terhadap teknologi digital.
3. Regulasi dan Kebijakan Pendukung, berupa peraturan yang menjamin keamanan data, privasi, serta keterbukaan informasi.
4. Partisipasi Publik, sebagai elemen sosial yang mendukung keberlanjutan implementasi *e-government* di daerah.

2.4.4 Tantangan dalam Implementasi E-Government

Meskipun menawarkan berbagai keuntungan, penerapan *e-government* juga menghadapi sejumlah tantangan yang signifikan. Muhajir et al. (2024) menyoroti hambatan seperti keterbatasan infrastruktur, rendahnya literasi digital aparatur, serta belum meratanya jaringan internet di daerah. Tantangan lainnya adalah

resistensi budaya birokrasi yang masih terbiasa dengan sistem manual dan hierarkis. Beberapa tantangan utama implementasi *e-government* dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Keterbatasan Infrastruktur Teknologi, terutama di daerah terpencil yang belum memiliki akses internet stabil.
2. Keterbatasan Anggaran, menyebabkan pemerintah daerah kesulitan dalam menyediakan sarana digital dan sistem keamanan data.
3. Rendahnya Kompetensi SDM, di mana banyak aparatur belum menguasai penggunaan aplikasi dan sistem digital.
4. Resistensi Birokrasi, yaitu keengganan sebagian aparatur untuk berubah dari pola kerja manual ke sistem berbasis teknologi.
5. Kurangnya Kesadaran Masyarakat, mengenai pentingnya pemanfaatan layanan digital pemerintahan.
6. Permasalahan Keamanan Data, seperti potensi kebocoran informasi akibat lemahnya sistem perlindungan siber.

Tantangan-tantangan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan *e-government* tidak hanya bergantung pada teknologi, tetapi juga pada kesiapan sumber daya manusia, kebijakan pendukung, dan budaya organisasi di lingkungan birokrasi.

2.4.5 Hubungan E-Government dengan Good Governance

E-government dan *good governance* memiliki hubungan yang saling memperkuat. Sedarmayanti (2017) menjelaskan bahwa *e-government* merupakan instrumen penting untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Melalui sistem digital, pemerintah dapat meningkatkan transparansi, memperluas partisipasi masyarakat, serta memperkuat akuntabilitas publik. Dwiyanto (2018) menambahkan bahwa *good governance* menuntut tiga elemen utama: transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas, yang semuanya dapat diperkuat dengan penerapan teknologi informasi. Misalnya, sistem *e-reporting* memungkinkan masyarakat mengakses laporan penggunaan anggaran secara terbuka, sementara platform digital memungkinkan publik memberikan umpan balik terhadap layanan

pemerintah. Dengan demikian, *e-government* berfungsi sebagai jembatan antara birokrasi dan masyarakat untuk menciptakan tata kelola yang efektif dan berintegritas. Penerapannya tidak hanya mempercepat proses pelayanan publik, tetapi juga membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

2.4.6 Penerapan E-Government dalam Konteks Kebijakan Makan Bergizi Gratis (MBG)

Dalam konteks pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), *e-government* berperan penting dalam mendukung efektivitas kebijakan. Menurut Rachmad et al. (2024), integrasi sistem digital dapat membantu proses pendataan penerima manfaat, monitoring distribusi makanan, serta evaluasi program secara berkelanjutan. Melalui sistem pelaporan daring, pemerintah daerah dapat mengurangi potensi kesalahan data dan meningkatkan transparansi pelaksanaan program. Ia juga menekankan bahwa penerapan *e-government* dalam kebijakan sosial seperti MBG mempercepat arus informasi antara dinas pendidikan, kesehatan, dan sosial. Dengan adanya sistem terintegrasi, setiap dinas dapat mengakses data penerima manfaat yang sama, sehingga meminimalkan tumpang tindih kewenangan dan kesalahan sasaran.

Selain itu, penerapan *e-government* juga memberikan manfaat lain dalam konteks pelaksanaan MBG, antara lain:

1. Mempermudah proses pelaporan dan evaluasi melalui aplikasi digital berbasis data *real-time*.
2. Meningkatkan transparansi penggunaan anggaran dengan sistem audit berbasis elektronik.
3. Meningkatkan koordinasi antarinstansi pemerintah daerah melalui basis data terintegrasi.
4. Memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintah, karena masyarakat dapat memantau hasil pelaksanaan program secara langsung.

Dengan demikian, integrasi *e-government* dalam kebijakan MBG diharapkan dapat memperkuat prinsip *good governance* dan menjamin program berjalan efektif, transparan, serta tepat sasaran di daerah seperti Kabupaten Tulang Bawang.

2.5 Landasan Teori

Landasan teori berfungsi sebagai dasar konseptual dalam menganalisis fenomena implementasi kebijakan publik, termasuk kebijakan Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Tulang Bawang. Teori yang digunakan dalam penelitian ini membantu memberikan kerangka berpikir yang sistematis dalam memahami bagaimana proses pelaksanaan kebijakan berlangsung, apa saja faktor yang memengaruhinya, dan sejauh mana prinsip *good governance* serta *e-government* berperan dalam mendukung efektivitas implementasi kebijakan tersebut. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan tiga landasan teoretis utama, yaitu (1) teori implementasi kebijakan publik, (2) model implementasi Grindle, serta (3) konsep *good governance* dan *e-government*.

2.5.1 Teori Implementasi Kebijakan Publik

Teori implementasi kebijakan publik menjelaskan bagaimana suatu kebijakan yang telah dirumuskan diterjemahkan menjadi tindakan konkret di lapangan. Dunn (2018) menjelaskan bahwa implementasi merupakan tahap penting dalam siklus kebijakan karena menentukan apakah kebijakan tersebut dapat mencapai tujuannya. Proses ini melibatkan interaksi kompleks antara aktor kebijakan, sumber daya, dan lingkungan sosial-politik yang memengaruhi keberhasilan pelaksanaannya. Menurut Dunn, implementasi kebijakan dipengaruhi oleh tiga aspek utama, yaitu kejelasan kebijakan, ketersediaan sumber daya, dan kondisi lingkungan kebijakan. Kejelasan kebijakan menyangkut sejauh mana tujuan dan mekanisme pelaksanaan dirumuskan secara terukur, ketersediaan sumber daya mencakup dana, infrastruktur, serta kompetensi pelaksana. Sedangkan kondisi lingkungan mencakup dukungan politik dan sosial yang mengiringi pelaksanaan kebijakan.

Dalam konteks Program MBG, teori ini digunakan untuk menilai sejauh mana kejelasan petunjuk teknis, kesiapan sumber daya manusia dan anggaran. Selain itu, dukungan kelembagaan di daerah memengaruhi keberhasilan pelaksanaan program. Dengan demikian, teori implementasi kebijakan publik memberikan kerangka untuk menganalisis hubungan antara kebijakan pusat. Serta sebagai pelaksana di daerah serta faktor-faktor yang menyebabkan adanya kesenjangan antara perencanaan dan realisasi kebijakan.

2.5.2 Model Implementasi Kebijakan Grindle

Selain teori umum implementasi kebijakan, penelitian ini juga menggunakan Model Implementasi Kebijakan yang dikemukakan oleh Merilee S. Grindle (2017). Model ini berfokus pada dua variabel utama, yaitu isi kebijakan (*content of policy*) dan konteks implementasi (*context of implementation*). Menurut Grindle, keberhasilan implementasi kebijakan bergantung pada bagaimana isi kebijakan dirancang dan sejauh mana kondisi lingkungan sosial, ekonomi, dan politik mendukung pelaksanaannya. Kedua variabel tersebut dijabarkan sebagai berikut:

1. Isi Kebijakan (*Content of Policy*)

Meliputi kejelasan tujuan kebijakan, manfaat yang diharapkan, sejauh mana perubahan yang ditimbulkan oleh kebijakan, ketersediaan sumber daya, serta komitmen pelaksana dalam menjalankan kebijakan.

2. Konteks Implementasi (*Context of Implementation*)

Mencakup kekuasaan dan kepentingan aktor yang terlibat, karakteristik lembaga pelaksana, tingkat kepatuhan masyarakat, serta dukungan politik terhadap kebijakan.

Grindle menekankan bahwa implementasi bukan hanya soal menjalankan kebijakan sesuai prosedur, tetapi juga kemampuan birokrasi untuk beradaptasi terhadap perubahan lingkungan dan menyesuaikan pelaksanaan di lapangan. Dalam penelitian ini, model Grindle digunakan untuk menganalisis dinamika pelaksanaan Program MBG di Kabupaten Tulang Bawang, khususnya dalam hal koordinasi

antarinstansi, dukungan politik, serta keterlibatan masyarakat dalam pengawasan program.

2.5.3 Relevansi Teori terhadap Penelitian

Berdasarkan uraian di atas, teori implementasi kebijakan publik dan model implementasi Grindle menjadi dasar analisis dalam memahami pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis di Kabupaten Tulang Bawang. Sementara itu, konsep *good governance* dan *e-government* digunakan untuk menilai sejauh mana pelaksanaan program tersebut mencerminkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dengan menggabungkan ketiga kerangka teori ini, penelitian diharapkan dapat menjelaskan tidak hanya faktor teknis dalam implementasi kebijakan, tetapi juga aspek tata kelola, komunikasi, dan peran teknologi digital dalam meningkatkan efektivitas kebijakan publik di tingkat daerah.

2.6 Kerangka Pikir Penelitian

Kerangka pikir penelitian ini menjelaskan hubungan antara dasar hukum, teori, serta fokus penelitian yang digunakan untuk memahami tata kelola pemerintah daerah melalui *e-government* dalam implementasi kebijakan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Tulang Bawang. Kerangka pikir ini berfungsi sebagai pedoman berpikir yang menggambarkan arah hubungan antarvariabel dan konsep yang digunakan dalam penelitian. Dengan menyusun kerangka pikir, peneliti dapat menelusuri bagaimana teori, kebijakan, dan kondisi empiris saling berkaitan dalam konteks pelaksanaan program publik. Program Makan Bergizi Gratis merupakan kebijakan sosial yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan gizi anak-anak sekolah.

Menurut Suharto (2015), kebijakan sosial merupakan bagian dari kebijakan publik yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup warga negara. Pelaksanaan kebijakan MBG berlandaskan pada sejumlah regulasi penting, yaitu Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah, Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020–2024, dan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional (BGN). Keempat peraturan ini menjadi dasar hukum bagi pemerintah pusat dan daerah dalam menjalankan kebijakan pemenuhan gizi masyarakat sebagai bagian dari pembangunan sumber daya manusia unggul. Penelitian ini mengangkat judul “Tata Kelola Pemerintah Daerah melalui *E-Government* dalam Implementasi Kebijakan Makan Bergizi Gratis di Kabupaten Tulang Bawang.” Judul ini relevan dengan arah kebijakan pemerintah yang menekankan transparansi dan efektivitas pelayanan publik berbasis digital. Menurut Rachmad et al. (2024), penerapan *e-government* menjadi instrumen penting dalam menciptakan tata kelola yang baik melalui pemanfaatan teknologi informasi untuk mempercepat pelayanan dan memperkuat akuntabilitas publik. Dengan demikian, *e-government* bukan hanya alat administratif, tetapi juga strategi tata kelola dalam pelaksanaan kebijakan publik di daerah.

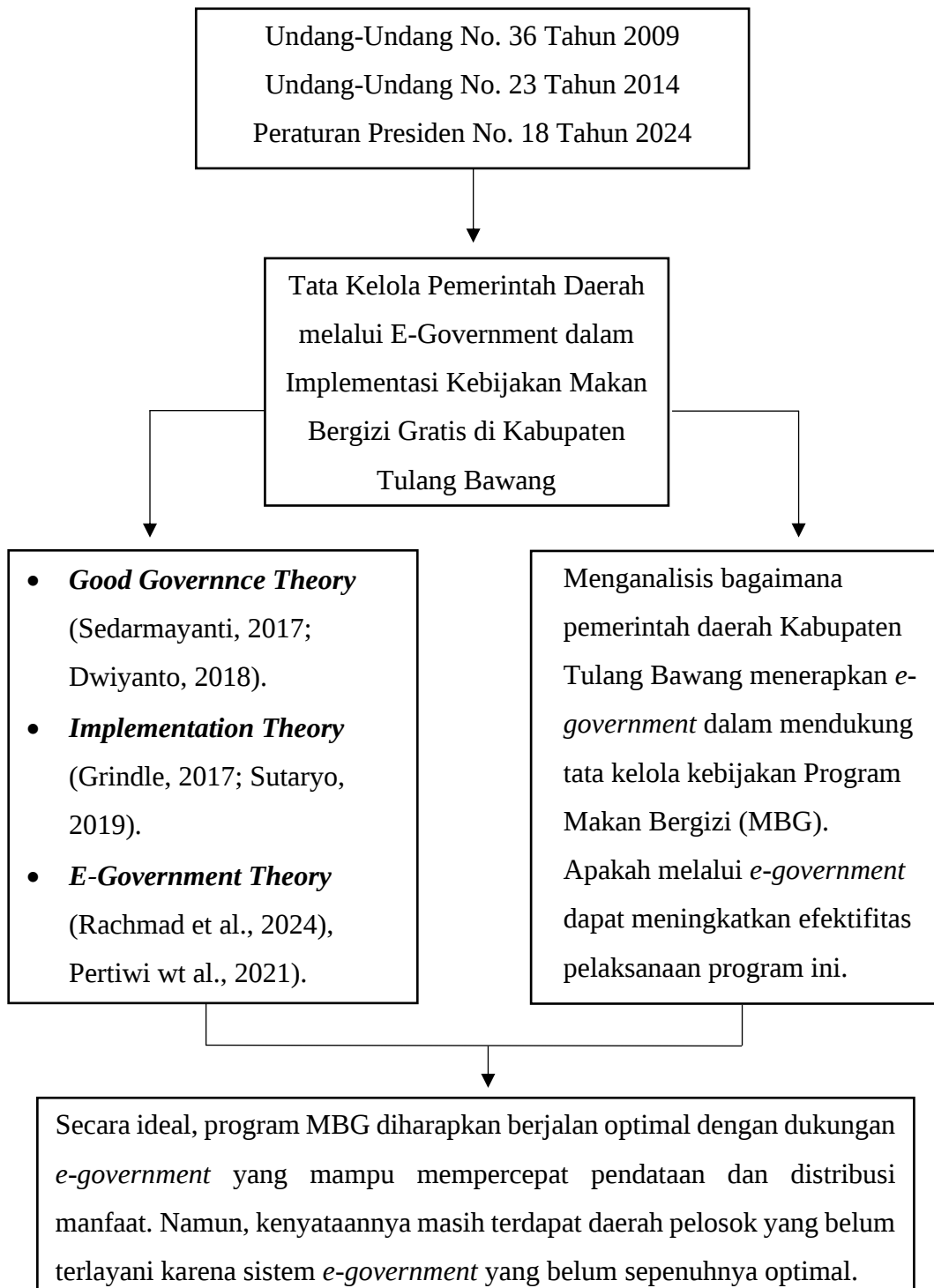
Dalam mengkaji pelaksanaan kebijakan tersebut, penelitian ini menggunakan tiga landasan teori utama. Pertama, Teori Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (*Good Governance Theory*) yang dijelaskan oleh Sedarmayanti (2017) dan Dwiyanto (2018), menekankan pentingnya prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan efektivitas dalam penyelenggaraan pemerintahan. Kedua, Teori Implementasi Kebijakan menurut Grindle (2017) dan Edward III (dalam Sutaryo, 2019), yang menjelaskan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh variabel komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Ketiga, Teori *E-Government* sebagaimana dijelaskan oleh Rachmad et al. (2024) dan Pertiwi et al. (2021), bahwa penggunaan teknologi informasi mampu memperkuat transparansi, efisiensi, dan keterlibatan publik dalam proses pemerintahan. Ketiga teori ini menjadi dasar analisis terhadap pelaksanaan program MBG di tingkat daerah.

Fokus penelitian diarahkan untuk menganalisis bagaimana tata kelola pemerintah daerah melalui *e-government* berperan dalam mendukung implementasi kebijakan Program Makan Bergizi Gratis di Kabupaten Tulang Bawang. Fokus ini mencakup proses perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan program melalui sistem digital

dan koordinasi antarinstansi terkait. Menurut Dunn (2018), analisis kebijakan publik bertujuan untuk menilai sejauh mana kebijakan yang diterapkan mampu mencapai tujuan yang telah dirumuskan. Oleh karena itu, penelitian ini menilai efektivitas kebijakan MBG dengan menyoroti kualitas tata kelola dan optimalisasi sistem e-government dalam pelaksanaannya.

Secara ideal, implementasi Program Makan Bergizi Gratis diharapkan mampu berjalan merata dan efektif di seluruh wilayah. Namun kenyataannya, pelaksanaan program ini masih menghadapi sejumlah kendala, terutama di daerah pelosok. Menurut Lendra et al. (2025) serta Rosidin et al. (2025), permasalahan utama dalam pelaksanaan MBG di tingkat daerah meliputi kurang optimalnya sistem pendataan berbasis *e-government* dan belum meratanya distribusi bantuan. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan dan implementasi di lapangan. Banyak data siswa yang belum tercantum secara akurat sehingga bantuan makan bergizi belum tersalurkan secara menyeluruh. Hal ini mengindikasikan perlunya peningkatan kapasitas tata kelola digital dan evaluasi kebijakan agar program dapat berjalan sesuai tujuan nasional.

Gambar 1. Kerangka Pikir Penelitian



Sumber: Diolah oleh Peneliti, 2025

III. METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan memahami secara mendalam fenomena sosial yang berkaitan dengan tata kelola pemerintah daerah melalui *e-government* dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Tulang Bawang. Penelitian kualitatif memungkinkan peneliti memperoleh data yang bersifat mendalam dan komprehensif melalui pemahaman terhadap perilaku, pandangan, dan pengalaman informan yang terlibat secara langsung dalam implementasi kebijakan tersebut. Dengan demikian, pendekatan ini memberikan gambaran nyata mengenai proses, kendala, serta strategi pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pemanfaatan teknologi digital.

Menurut Denzin dan Lincoln dalam Grindle (2017), penelitian kualitatif menekankan pada pemahaman terhadap makna tindakan sosial berdasarkan perspektif pelaku di lingkungan alaminya. Pendekatan ini tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis, melainkan untuk menemukan pemahaman yang mendalam tentang realitas sosial yang sedang berlangsung. Oleh karena itu, peneliti berperan sebagai instrumen utama penelitian yang berinteraksi langsung dengan informan dan lingkungan penelitian guna memperoleh data faktual dan bermakna. Melalui tipe penelitian deskriptif, penelitian ini berupaya menggambarkan dan menafsirkan bagaimana implementasi kebijakan MBG dijalankan melalui sistem *e-government*, serta sejauh mana praktik tersebut mencerminkan nilai-nilai *good governance* dalam konteks pemerintahan daerah.

3.2 Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini diarahkan untuk memahami secara mendalam bagaimana tata kelola pemerintah daerah melalui *e-government* diterapkan dalam implementasi kebijakan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Tulang Bawang. Penelitian ini berupaya menggali proses implementasi kebijakan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program yang melibatkan berbagai perangkat daerah. Selain itu, penelitian ini juga menelaah bagaimana pemanfaatan sistem *e-government* berperan dalam meningkatkan efektivitas, efisiensi, serta transparansi penyelenggaraan program sosial tersebut. Dengan demikian, fokus utama penelitian ini tidak hanya pada hasil kebijakan, tetapi juga pada proses interaksi antaraktor yang terlibat dalam pelaksanaannya.

Secara lebih spesifik, fokus penelitian ini mencakup dua aspek penting. Pertama, analisis terhadap pelaksanaan tata kelola pemerintahan daerah melalui *e-government* dalam mendukung kebijakan MBG, yang meliputi mekanisme koordinasi antarinstansi, penggunaan teknologi informasi dalam pendataan dan distribusi bantuan, serta keterlibatan publik dalam proses implementasi. Kedua, identifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat yang memengaruhi efektivitas penerapan *e-government* di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang. Melalui fokus tersebut, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran komprehensif mengenai sejauh mana sistem tata kelola digital berkontribusi terhadap keberhasilan kebijakan publik berbasis kesejahteraan sosial di daerah.

3.3 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung. Lokasi ini dipilih secara purposif karena Kabupaten Tulang Bawang merupakan salah satu daerah yang telah melaksanakan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sesuai dengan kebijakan pemerintah pusat. Selain itu, pemerintah daerah ini juga sedang mengembangkan sistem *e-government* dalam berbagai aspek pelayanan publik, termasuk dalam tata kelola pelaksanaan program sosial. Hal tersebut menjadikan Kabupaten Tulang Bawang sebagai lokasi yang relevan untuk dikaji

dalam konteks implementasi kebijakan berbasis digital dan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Secara administratif, Kabupaten Tulang Bawang memiliki beragam karakteristik sosial, ekonomi, dan geografis yang menarik untuk diteliti. Pemerintah daerah setempat terus berupaya meningkatkan kinerja pelayanan publik melalui inovasi berbasis teknologi, salah satunya dengan penerapan sistem *e-government* yang terintegrasi dalam berbagai dinas. Implementasi program MBG di daerah ini melibatkan berbagai perangkat daerah seperti Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, dan Dinas Komunikasi dan Informatika, yang saling berkoordinasi dalam pengumpulan data dan pelaporan kegiatan. Dengan kondisi tersebut, lokasi ini memberikan ruang bagi peneliti untuk menganalisis secara mendalam bagaimana kolaborasi antarinstansi dan penggunaan teknologi digital berkontribusi terhadap keberhasilan implementasi kebijakan publik di tingkat daerah.

Penelitian di Kabupaten Tulang Bawang juga diharapkan dapat memberikan gambaran empiris mengenai praktik tata kelola pemerintahan daerah di era digital. Melalui studi di lokasi ini, peneliti dapat memahami secara langsung bagaimana kebijakan MBG dioperasionalkan melalui sistem informasi pemerintah daerah, serta bagaimana faktor-faktor internal dan eksternal memengaruhi efektivitas pelaksanaannya. Selain itu, lokasi ini memberikan kesempatan bagi peneliti untuk mengamati secara nyata dinamika interaksi antara pemerintah, masyarakat, dan teknologi dalam penyelenggaraan kebijakan sosial yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

3.4 Jenis dan Sumber Data Penelitian

Penelitian ini menggunakan dua jenis data utama, yaitu data primer dan data sekunder. Kedua jenis data tersebut digunakan secara saling melengkapi untuk memberikan pemahaman yang komprehensif terhadap fenomena tata kelola pemerintah daerah melalui *e-government* dalam implementasi kebijakan Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Tulang Bawang. Data primer berfungsi sebagai sumber informasi utama yang diperoleh langsung dari lapangan, sedangkan data

sekunder menjadi pendukung untuk memperkuat dan memperjelas hasil temuan lapangan.

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung oleh peneliti dari sumber pertama melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan dokumentasi kegiatan. Data ini mencerminkan pengalaman dan pandangan informan yang terlibat secara langsung dalam pelaksanaan program. Informan dalam penelitian ini ditentukan menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu pemilihan informan berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan topik penelitian. Adapun informan yang dijadikan sumber data primer antara lain:

- 1) Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tulang Bawang.
- 2) Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tulang Bawang.
- 3) Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulang Bawang.
- 4) Kepala sekolah penerima program MBG.
- 5) Operator sistem *e-government* di tingkat dinas.
- 6) Masyarakat penerima manfaat program MBG.

Data primer ini memberikan gambaran faktual mengenai proses pelaksanaan kebijakan, pemanfaatan teknologi informasi, serta faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi *e-government* di lingkungan pemerintah daerah.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data pendukung yang diperoleh dari sumber tidak langsung, seperti dokumen resmi, laporan, hasil penelitian, publikasi ilmiah, dan literatur yang relevan dengan topik penelitian. Data sekunder digunakan untuk memperkuat temuan dari lapangan, memberikan dasar teoritis, serta menjadi bahan pembandingan antara teori dan praktik di lapangan. Menurut Sugiyono (2022), data sekunder berfungsi sebagai data pelengkap yang

membantu peneliti memahami konteks penelitian secara lebih luas dan mendalam.

Dalam penelitian ini, data sekunder diperoleh dari berbagai sumber berikut:

- 1) Dokumen kebijakan dan laporan resmi pemerintah, seperti peraturan daerah, pedoman pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), laporan tahunan Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, serta Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulang Bawang.
- 2) Data dari situs resmi pemerintah daerah dan portal nasional seperti <https://tulangbawangkab.go.id/> yang memuat informasi pelaksanaan program e-government dan pelayanan publik di daerah.
- 3) Hasil penelitian dan literatur ilmiah, antara lain karya Dunn (2018) tentang analisis kebijakan publik, Grindle (2017) mengenai implementasi kebijakan di negara berkembang, serta Suharto (2015), Sedarmayanti (2017), dan Dwiyanto (2018) mengenai tata kelola pemerintahan dan reformasi birokrasi.
- 4) Artikel dan jurnal ilmiah terkini, seperti penelitian oleh Lendra et al. (2025) tentang kebijakan makan bergizi gratis dan nilai-nilai *good governance*, serta Rosidin et al. (2025) yang membahas tantangan implementasi program MBG di pemerintah daerah.

Melalui penggabungan antara data primer dan sekunder, penelitian ini diharapkan dapat memberikan analisis yang lebih kuat dan mendalam mengenai bagaimana tata kelola pemerintah daerah berbasis *e-government* mendukung keberhasilan kebijakan publik dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah penting dalam penelitian kualitatif karena menentukan kualitas dan kedalaman informasi yang diperoleh. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yang saling melengkapi untuk mendapatkan pemahaman yang menyeluruh tentang tata kelola pemerintah daerah melalui *e-government* dalam implementasi kebijakan

Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Tulang Bawang. Menurut Moleong (2021), pengumpulan data kualitatif dilakukan dalam konteks alamiah dan berfokus pada pemaknaan terhadap peristiwa sosial, bukan sekadar pengukuran angka. Oleh karena itu, peneliti secara langsung terlibat di lapangan untuk menggali informasi mendalam dari berbagai sumber yang relevan dengan fokus penelitian.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari tiga metode utama, yaitu wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Ketiga metode ini dipilih karena dapat saling melengkapi dan memberikan keakuratan data melalui proses triangulasi, yaitu perbandingan antara berbagai sumber informasi untuk memastikan validitas data yang diperoleh. Setiap teknik digunakan secara sistematis dan disesuaikan dengan karakteristik informan serta konteks situasi di lapangan. Dengan demikian, data yang terkumpul tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga mencerminkan pemahaman terhadap makna, pengalaman, dan interaksi sosial yang terjadi dalam proses implementasi kebijakan publik berbasis digital.

1. Wawancara Mendalam (*In-Depth Interview*)

Wawancara mendalam dilakukan untuk menggali informasi secara langsung dari informan yang dianggap memahami dan terlibat dalam pelaksanaan kebijakan MBG di Kabupaten Tulang Bawang. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur, di mana peneliti menyiapkan pedoman wawancara namun tetap memberi ruang bagi informan untuk mengemukakan pendapat secara bebas dan alami. Melalui wawancara ini, peneliti memperoleh data mengenai proses koordinasi antarinstansi, pemanfaatan teknologi *e-government*, kendala dalam pelaksanaan program, serta persepsi informan terhadap efektivitas kebijakan. Proses wawancara dilakukan secara tatap muka dan, jika diperlukan, dapat dilengkapi dengan komunikasi daring untuk menjaga kelancaran pengumpulan data.

2. Observasi Lapangan

Observasi dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh gambaran nyata mengenai kondisi dan aktivitas di lapangan yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan MBG berbasis *e-government*. Menurut Spradley

dalam Moleong (2021), observasi memungkinkan peneliti memahami perilaku sosial dan situasi yang sedang berlangsung tanpa mengubah konteks alamiahnya. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan observasi di beberapa instansi terkait seperti Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, serta sekolah-sekolah penerima program MBG untuk melihat proses pendataan, pelaporan digital, dan mekanisme koordinasi antarpegawai. Hasil observasi dicatat secara sistematis dalam bentuk catatan lapangan untuk mendukung data hasil wawancara.

3. Dokumentasi

Teknik dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data tertulis dan visual yang relevan dengan topik penelitian. Dokumen yang dikaji meliputi peraturan daerah, surat keputusan, laporan kegiatan, notulen rapat, berita dari situs resmi pemerintah daerah, serta arsip digital yang menunjukkan proses implementasi kebijakan MBG. Menurut Sugiyono (2022), dokumentasi berperan penting sebagai bukti administratif dan sumber data sekunder yang dapat diverifikasi keabsahannya. Data dari dokumentasi ini tidak hanya berfungsi sebagai pelengkap hasil wawancara dan observasi, tetapi juga digunakan untuk menelusuri konsistensi pelaksanaan kebijakan di tingkat daerah.

Melalui kombinasi ketiga teknik tersebut, peneliti memperoleh data yang bersifat menyeluruh, mendalam, dan dapat dipercaya. Wawancara memberikan perspektif subjektif informan, observasi menggambarkan situasi faktual di lapangan, dan dokumentasi memperkuat hasil temuan melalui bukti tertulis yang sah. Penggunaan teknik pengumpulan data yang beragam juga mendukung proses triangulasi, sehingga hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan mencerminkan kondisi nyata di Kabupaten Tulang Bawang.

3.6 Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif merupakan proses yang dilakukan secara terus-menerus sejak data diperoleh hingga penelitian selesai. Tujuan utama analisis

data adalah menafsirkan makna dari informasi yang dikumpulkan agar dapat menjawab rumusan masalah penelitian. Menurut Miles, Huberman, dan Saldana (2014), analisis data kualitatif mencakup tiga komponen utama yang dilakukan secara interaktif, yaitu reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan penarikan kesimpulan serta verifikasi (*conclusion drawing/verification*). Ketiga tahapan ini saling berkaitan dan berlangsung sepanjang proses penelitian, bukan hanya setelah semua data terkumpul.

Berikut tahapan teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini:

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Tahap ini merupakan proses pemilihan, penyederhanaan, dan pemfokusan data mentah yang diperoleh dari lapangan. Peneliti menyeleksi informasi yang relevan dengan fokus penelitian, seperti pelaksanaan *e-government* dalam kebijakan Makan Bergizi Gratis (MBG), koordinasi antarinstansi, serta kendala dan faktor pendukung implementasi kebijakan. Data yang tidak berkaitan langsung dengan topik penelitian disisihkan agar analisis menjadi lebih terarah. Menurut Miles dan Huberman (2014), reduksi data membantu peneliti menyoroti hal-hal penting dan mempermudah dalam menemukan pola atau tema utama dari hasil penelitian.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Setelah data direduksi, langkah berikutnya adalah menyajikan data dalam bentuk yang mudah dipahami. Penyajian data dilakukan melalui uraian naratif, kutipan hasil wawancara, tabel ringkasan, atau bagan hubungan antaraktor dalam implementasi kebijakan. Tahap ini bertujuan untuk mempermudah peneliti dalam melihat keterkaitan antara satu informasi dengan informasi lainnya. Penyajian data juga membantu proses interpretasi terhadap temuan di lapangan, seperti bagaimana sistem *e-government* diterapkan untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan program MBG.

3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi (*Conclusion Drawing/Verification*)

Tahap terakhir dalam analisis data adalah penarikan kesimpulan berdasarkan hasil reduksi dan penyajian data yang telah dilakukan. Pada tahap ini, peneliti menafsirkan makna data dan menghubungkannya dengan teori yang digunakan dalam penelitian, seperti teori implementasi kebijakan publik oleh Dunn (2018) dan Grindle (2017). Proses verifikasi dilakukan untuk memastikan bahwa kesimpulan yang diambil benar-benar didukung oleh bukti yang kuat. Selain itu, peneliti juga melakukan triangulasi data, yaitu membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk menjamin keabsahan hasil analisis. Dengan demikian, kesimpulan yang dihasilkan bersifat valid dan dapat dipercaya.

Dengan menerapkan tiga tahapan analisis tersebut, peneliti dapat menggali makna yang mendalam dari data yang diperoleh di lapangan. Pendekatan analisis ini membantu peneliti memahami bagaimana implementasi *e-government* berperan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang efektif, transparan, dan akuntabel dalam pelaksanaan kebijakan Makan Bergizi Gratis di Kabupaten Tulang Bawang.

3.7 Teknik Keabsahan Data

Dalam penelitian kualitatif, keabsahan data sangat penting untuk menjamin bahwa hasil penelitian dapat dipercaya dan dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Keabsahan data menunjukkan sejauh mana data yang diperoleh benar-benar menggambarkan realitas yang diteliti dan bebas dari bias peneliti. Menurut Lincoln dan Guba dalam Moleong (2021), terdapat empat kriteria utama dalam menguji keabsahan data kualitatif, yaitu kredibilitas (*credibility*), transferabilitas (*transferability*), dependabilitas (*dependability*), dan konfirmabilitas (*confirmability*). Keempat aspek ini menjadi dasar bagi peneliti untuk memastikan bahwa proses pengumpulan, analisis, dan penarikan kesimpulan dilakukan secara konsisten dan objektif.

Berikut penjelasan masing-masing teknik keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini:

1. Kredibilitas (*Credibility*)

Kredibilitas berkaitan dengan sejauh mana data penelitian dapat dipercaya kebenarannya. Untuk memastikan kredibilitas, peneliti melakukan triangulasi sumber dan metode, yaitu membandingkan hasil wawancara dengan observasi serta dokumen pendukung. Selain itu, dilakukan juga *member check*, yaitu meminta konfirmasi dari informan mengenai keakuratan data dan interpretasi peneliti terhadap hasil wawancara. Dengan cara ini, peneliti memastikan bahwa data yang digunakan sesuai dengan pengalaman dan pandangan asli dari informan. Kredibilitas juga diperkuat dengan keterlibatan peneliti secara intensif di lapangan sehingga memahami konteks sosial dan budaya lokasi penelitian secara mendalam.

2. Transferabilitas (*Transferability*)

Transferabilitas mengacu pada sejauh mana hasil penelitian dapat diterapkan pada konteks atau situasi lain yang memiliki kesamaan karakteristik. Untuk mencapai hal ini, peneliti menyajikan deskripsi yang rinci (*thick description*) mengenai latar belakang penelitian, karakteristik informan, serta kondisi sosial dan administratif Kabupaten Tulang Bawang. Deskripsi yang lengkap ini memungkinkan pembaca atau peneliti lain menilai apakah hasil penelitian dapat digunakan pada konteks yang serupa. Dengan demikian, transferabilitas membantu memperluas relevansi hasil penelitian terhadap implementasi kebijakan publik di daerah lain yang juga menerapkan sistem *e-government*.

3. Dependabilitas (*Dependability*)

Dependabilitas berkaitan dengan konsistensi proses penelitian dari awal hingga akhir. Untuk memastikan dependabilitas, peneliti melakukan pencatatan yang sistematis terhadap seluruh kegiatan penelitian, mulai dari tahap perencanaan, pengumpulan data, analisis, hingga penarikan

kesimpulan. Catatan tersebut mencakup pedoman wawancara, hasil observasi, serta dokumentasi yang digunakan selama penelitian. Dengan demikian, apabila penelitian ini direplikasi pada waktu dan tempat yang berbeda, proses dan hasilnya dapat dibandingkan untuk menilai tingkat konsistensinya. Dependabilitas juga ditingkatkan melalui proses audit trail, yaitu pemeriksaan kembali seluruh prosedur penelitian oleh dosen pembimbing atau rekan sejawat.

4. Konfirmabilitas (*Confirmability*)

Konfirmabilitas berhubungan dengan sejauh mana hasil penelitian bebas dari pengaruh subjektivitas peneliti dan benar-benar didasarkan pada data yang diperoleh di lapangan. Untuk menjamin hal ini, peneliti mendokumentasikan seluruh data mentah seperti hasil wawancara, rekaman suara, dan catatan observasi sebagai bukti empiris yang dapat ditelusuri. Selain itu, peneliti menjaga objektivitas dengan tidak memanipulasi data agar sesuai dengan harapan tertentu. Proses analisis dilakukan secara terbuka dan transparan dengan melibatkan pembimbing atau sejawat sebagai pihak yang memberikan umpan balik terhadap interpretasi peneliti. Dengan demikian, hasil penelitian dapat dipastikan berasal dari data faktual, bukan opini pribadi peneliti.

Melalui penerapan keempat teknik tersebut, penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan data yang valid, konsisten, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Upaya menjaga keabsahan data juga menjadi bagian penting dari komitmen peneliti untuk menghasilkan karya akademik yang objektif, mendalam, dan relevan dengan perkembangan tata kelola pemerintahan berbasis *e-government* di Indonesia, khususnya pada konteks implementasi kebijakan Makan Bergizi Gratis di Kabupaten Tulang Bawang.

DAFTAR PUSTAKA

- Afrimadona, D. R., Imawan, R. P., Ratri, I., & Shanti, D. (2022). *Memaknai kebijakan berorientasi manusia: Sepuluh pelajaran berharga pasca pandemi COVID-19*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Amirullah, I., Sari, L. P., Syafaruddin, S., Rasyid, M. F. F., Lira, H. A., Mallappiang, N., ... & Natsir, N. (2023). Pengembangan sistem informasi desa untuk meningkatkan transparansi administrasi desa melalui e-government. *ASPIRASI: Publikasi Hasil Pengabdian dan Kegiatan Masyarakat*, 1(6), 89–96.
- Dunn, W. N. (2018). *Public policy analysis: An integrated approach*. Routledge.
- Dwiyanto, A. (2018). *Mewujudkan good governance melalui pelayanan publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Fitri, M., Indriyani, L. T., & Hidayat, R. (2023). Pengembangan masyarakat sebagai upaya membangun desa mandiri dan bebas stunting. *Jurnal Pengabdian Multidisiplin*, 3(3).
- Grindle, M. S. (2017). *Politics and policy implementation in the Third World*. Princeton University Press.
- Lendra, I. W., Husni, D., & Fitriani, Y. (2025). Kebijakan makan bergizi gratis dan relevansinya terhadap nilai-nilai good governance: Analisis kualitatif dalam administrasi publik. *Arus: Jurnal Sosial dan Humaniora*, 5(1), 937–945.
- Muhajir, R., Abdurrahman, A., & Hidayatullah, H. (2024). Analisis pelaksanaan elektronik government sebagai upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). *Journal Law and Government*, 2(2), 90–112.

- Nooraini, F. F., Ling, L., & Asmorowati, S. (2024). *Bab 8: Peran policy entrepreneur dalam program makan bergizi gratis. Dalam Policy entrepreneur dalam ekosistem kebijakan* (hlm. 150).
- Pati, B., Ferdian, K. J., & Rahman, B. (2022). Implementasi kebijakan inovasi pelayanan publik berbasis e-government: Studi terhadap aplikasi Smart in PIRT di Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka. *Jurnal Trias Politika*, 6(2), 245–263.
- Pertiwi, A., Dema, H., Mustanir, A., & Anugrah, E. (2021). Penerapan e-government dalam mewujudkan transparansi tata kelola pemerintahan desa (studi pada pemerintahan desa Bulu Timoreng). *PRAJA: Jurnal Ilmiah Pemerintahan*, 9(3), 130–139.
- Putra, I. G. J. E., Putra, M. A. P., & Juliana, I. K. A. (2020). Perencanaan masterplan teknologi informasi pada pemerintahan desa berbasis e-government. *INSERT: Information System and Emerging Technology Journal*, 1(2), 120–129.
- Rachmad, Y. E., Ilham, R., Indrayani, N., Manurung, H. E., Judijanto, L., Laksono, R. D., & Sa'dianoor, S. D. (2024). *Layanan dan tata kelola e-government: Teori, konsep dan penerapan*. PT Green Pustaka Indonesia.
- Rahmawati, N. A., Prasetyo, S. A., & Ramadhani, M. W. (2024). Memetakan visi Prabowo Gibran pada masa kampanye dalam perspektif pembangunan: Analisis wacana kritis visi dan misi Prabowo Gibran dalam perspektif modernisasi. *WISSEN: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 2(3), 97–120.
- Rosidin, A., Maulana, J., & Dharmawan, A. (2025). Tantangan dan strategi implementasi program makan bergizi gratis: Studi kasus pemerintah daerah Provinsi Banten. *Jurnal Hukum dan Administrasi Publik*, 3(2), 131–143.
- Sedarmayanti. (2017). *Reformasi birokrasi dan good governance*. Bandung: Mandar Maju.
- Suharto, E. (2015). *Kebijakan sosial sebagai kebijakan publik*. Bandung: Alfabeta.

- Susanto, H. (2022). Kebijakan komunikasi dalam implementasi program sosial. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 8(1), 45–59.
- Sutaryo. (2019). *Implementasi kebijakan publik di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Santoso, A., Melianawati, B. D., & Ayuningtyas, E. A. (2025). Governance analysis of the implementation of the free nutritious meal program. *Jurnal Manajemen Bisnis dan Organisasi*, 4(1), 240–270.